

Format Acara dan Durasi Debat Diubah

REPUBLIKA - 21 Jan '19 (2)

● FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mengubah format debat pada perhelatan kedua, 17 Februari mendatang. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan, perubahan format debat didasarkan pada hasil evaluasi debat perdana 17 Januari lalu. Menurut dia, ada sejumlah hal yang akan diperbaiki untuk pelaksanaan debat kedua.

"Kami dalam rapat pleno sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh debat pertama, dan kita punya format dan mekanisme debat yang lebih baik daripada debat pertama," kata Wahyu di Jakarta, Ahad (20/1).

Wahyu membeberkan sejumlah catatan evaluasi KPU di debat pertama kemarin. Misalnya, debat kedua nanti akan dirancang agar kedua pasangan calon bisa lebih menunjukkan kapasitas dalam menyampaikan visi, misi, gagasan, dan program yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. "Untuk debat kedua, abstraksi kisi-kisi soal yang dibuat panelis tidak akan kita beritahukan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Selain itu, KPU juga akan memperbarui durasi debat, terutama durasi dalam penyampaian visi, misi, dan program kedua kandidat. Wahyu mengatakan, KPU juga akan mempertimbang-

kan kehadiran pendukung di ruang debat.

"Rakyat merasa tidak nyaman dengan kegaduhan di tayangan itu. Perlu diketahui bahwa KPU itu *kan* tidak melayani elite, KPU itu melayani rakyat. Jadi, kami tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat untuk mendapatkan hak menonton, menyimak, mencermati debat berikutnya itu dengan lebih nyaman dan leluasa," ujarnya.

Ia menambahkan, KPU akan lebih mengaktifkan panelis debat di debat kedua. Rencananya, KPU akan menggelar evaluasi internal dengan beberapa pihak pada Senin (21/1), pukul 16.00 WIB, di KPU.

Perkumpulan untuk Pemilu

dan Demokrasi (Perludem) turut memberikan evaluasi terkait pelaksanaan debat pertama. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai KPU seharusnya tidak perlu lagi menunggu persetujuan tim pasangan calon terkait nama-nama panelis di debat kedua nanti.

"Ini yang kemudian menjadi catatan sampai kemudian pada saat proses kegiatan debat terjadi pergantian panelis di tengah jalan karena ketidaksetujuan dari masing-masing paslon," kata Fadli dalam diskusi Evaluasi dan Rekomendasi Debat Pilpres 2019, Ahad (20/1).

Menurut dia, langkah KPU meminta paslon mengirimkan sejumlah nama panelis justru

menunjukkan ketidaksiapan KPU dalam menyelenggarakan debat. Perludem berpendapat, sangat penting bagi KPU untuk mengoptimalkan kemandirian dalam penentuan panelis. "Kami mendorong KPU *enggak* perlu meminta persetujuan akhir dari tim paslon dari panelis debat, cukup meminta masukan saja. Keputusan akhir ada di tangan KPU," ujarnya.

Selain itu, Perludem juga mengevaluasi adanya tarik ulur soal pemberian kisi-kisi oleh KPU kepada tim paslon. Menurut dia, adanya kisi-kisi tersebut justru tidak membuat jawaban paslon menjadi mendalam. "Jadi, tidak muncul dialektika yang cukup dinamis dalam proses

debat karena mereka, paslon, sudah terpatri dengan jawaban yang dipersiapkan," ujarnya.

Fadli mengatakan, Perludem juga mewanti-wanti KPU untuk mengurangi jumlah kehadiran pendukung kedua paslon. Adanya pendukung tersebut justru membuat suasana ruang debat menjadi tidak kondusif, membuat konsentrasi serta fokus paslon terganggu.

Selanjutnya, debat pertama juga dinilai kurang menyertakan pembahasan yang substansif. Sebab, pertanyaan panelis tak optimal mengkonkretkan visi, misi, dan program yang butuh dipertimbangkan penonton untuk menentukan pilihannya.

■ ed: agus raharjo